

## **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberikan nuansa kehidupan yang cerdas pula, secara progresif akan membentuk kemandirian. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar dalam proses pembangunan di suatu negara, baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Terbentuknya kualitas pendidikan yang dapat mengantarkan masyarakat pada kecerdasan dan kemandirian, diperlukan kerangka sistem penyelenggaraan pendidikan yang meliputi kejelasan arah kebijakan yang ditetapkan.

Desentralisasi pendidikan sebagai kebijakan yang berhubungan dengan politik berpengaruh pada proses pembangunan pendidikan. Pembangunan merupakan suatu proses alami, otonom, dan kontekstual. Dalam hal ini pembangunan diartikan sebagai proses belajar yang bertahap, sehingga ada proses kapitalisasi kemajuan pada setiap tahap, dan diharapkan pembangunan berperan sebagai proses positif yang memperbaiki mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Adanya kebijakan desentralisasi pendidikan tidak serta merta muncul begitu saja, namun antara lain karena adanya kegagalan kebijakan sentralistik yang dinilai kurang memberikan wacana bagi pengembangan dimensi demokrasi sebagai aspek penting dalam proses pendidikan. Selain itu pula kebijakan sentralistik dirasa kurang mampu menyelesaikan masalah pendidikan yang ada di tingkat daerah. Kebijakan sentralistik bersifat normatif sehingga seringkali apa yang menjadi kebijakan tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada pada level daerah, sedangkan kebijakan desentralisasi diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang bersifat teknis sehingga

masalah-masalah yang ada di daerah dapat teratasi, tentu dengan peran serta dari masyarakat sebagai salah satu agen pembelajar.

Kebijakan desentralisasi pendidikan menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasikan keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan sistem sekolah yang ada. Dalam hal ini kebijakan desentralisasi berfungsi sebagai jembatan antara partisipasi masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Melalui desentralisasi dan privatisasi pendidikan, pemerintah berharap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat meningkat.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), yang diacu dalam Harahap (2001), partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.

Melalui desentralisasi dan privatisasi pendidikan, pemerintah berharap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat meningkat. Partisipasi diyakini mampu menggerakkan dinamika masyarakat menuju terwujudnya pendidikan bermutu. Bentuk partisipasi masyarakat yang dianggap baik adalah partisipasi yang diklasifikasikan sebagai citizen power, karena dalam partisipasi bentuk tersebut terdapat keterlibatan civil society sebagai pilar penting dalam menggerakkan masyarakat demokratis. Sekolah dalam paradigma baru, lebih terbuka terhadap peluang keterlibatan pihak lain di luar sekolah. Partisipasi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam pendidikan bukan sekedar harapan melainkan suatu tuntutan yang harus dilaksanakan dalam berbagai kegiatan di lapangan.

Hal ini sejalan dengan strategi manajemen berbasis sekolah yang mempersyaratkan partisipasi aktif dari semua komponen sekolah meliputi tenaga kependidikan, orang tua murid, dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 56 ayat 1 disebutkan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. Peningkatan partisipasi masyarakat ditopang dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang tujuannya antara lain memwadahi partisipasi masyarakat dalam kerangka pembangunan pendidikan yang memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, relevansi, dan peningkatan mutu. Namun yang terjadi partisipasi dalam pendidikan masih rendah.

Keadaan seperti di atas harus segera diperbaiki. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di sekolah merupakan hak yang harus diberikan, ditumbuhkan, serta dibuka seluas-luasnya dalam setiap proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik).

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Komitmen untuk menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sudah cukup jelas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 (UU Sisdiknas), pada Bab XV, pasal 54 ayat (1) yang

menyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Selanjutnya pada pasal yang sama sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Masyarakat pada saat ini semakin menyadari pentingnya mutu pendidikan, baik bagi dirinya maupun bagi eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Masyarakat khususnya orang tua siswa dituntut mau melibatkan diri ikut bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas pendidikan, di antaranya dengan berperan dalam lembaga Dewan Sekolah yang berada di semua level sekolah.

Sekolah dasar merupakan pendidikan formal pertama bagi seorang anak, yang paling kecil, namun merupakan benih, inti dan fundamental. Hal itu dikarenakan pendidikan dasar berusaha mencari dan menemukan dasar yang paling elementer bagi peserta didik untuk pendidikan selanjutnya. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, maka pendidikan dasar merupakan fondasi. Apabila diinginkan bangunan yang kokoh maka diperlukan fondasi yang berkualitas. Demikian juga dengan pendidikan dasar, apabila diinginkan benih yang baik (lulusan), maka diperlukan pendidikan yang berkualitas baik dari segi intelektual, emosional maupun spiritual.

SDN 8 Wirimpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo merupakan sekolah yang telah berkembang dengan image baru yaitu kebijakan mutu sekolah yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, dimana sekolah mengajarkan untuk hidup bersih dan sehat dengan mencintai alam sekitar. Sekolah ini juga berusaha menyelaraskan antara kecerdasan otak kanan dan otak kiri, dengan berusaha memberikan pengalaman kepada peserta didik mengenai segala sesuatu, dan tidak hanya sekedar teori semata. Sehingga peserta didik mampu mengerti karena sudah melakukannya sendiri. Dengan input yang berlatar belakang berbeda-beda dan dengan

kecerdasan rata-rata, sekolah ini berusaha membuat peserta didik menjadi lebih baik meski tidak terlihat menonjol.

Namun demikian usaha sekolah untuk menyelaraskan kecerdasan otak kanan dan kiri tersebut masih perlu mendapat masukan lagi untuk peningkatan mutunya. Berdasarkan hasil wawancara pada waktu pra observasi dengan kepala sekolah diperoleh bahwa dalam pelaksanaan peningkatan mutu di sekolah tersebut mendapatkan beberapa kendala diantaranya partisipasi orang tua yang berpendidikan rendah berdampak pada rendahnya perhatian orang tua pada pendidikan anak. SDN 8 Wirimpalenna Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo juga merupakan sekolah yang telah berkembang dalam perjalanannya. Dengan adanya *image* sekolah sebagai sekolah yang berwawasan lingkungan hidup, maka sekolah ini kini sudah mulai dikenal oleh publik. Apalagi didukung dengan kebijakan mutu sekolah yang tidak hanya berorientasi pada akademik semata, namun juga mengembangkan kecerdasan lain untuk peduli pada lingkungan. Dengan adanya kebijakan sekolah yang baru tersebut maka sekolah berusaha mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan sekolah, baik dalam perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi kebijakan sekolah. Walaupun informasi tentang perubahan-perubahan terbaru yang terjadi di sekolah masih dalam tahap sosialisasi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam pendidikan demi proses kebijakan mutu sekolah di SDN 8 Wirimpalenna Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Berdasarkan latar belakang masalah diuraikan di atas dan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di SDN 8 Wirimpalenna Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo maka diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masyarakat secara luas belum banyak diikutsertakan dan dilibatkan dalam proses kebijakan di sekolah. Dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pendidikan.

2. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan hanya terbatas pada dana/ pembiayaan pendidikan.
3. Partisipasi orang tua yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah berdampak pula pada rendahnya perhatian orang tua pada pendidikan anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran partisipasi masyarakat dalam pendidikan di SDN 8 Wirimpalenna Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pendidikan di SDN 8 Wirimpalenna Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan di SDN 8 Wirimpalenna Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran partisipasi masyarakat dalam pendidikan di SDN 8 Wirimpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pendidikan di SDN 8 Wirimpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan di SDN 8 Wirimpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkrit dan dapat dijadikan sumber referensi dalam menentukan kebijakan tentang partisipasi masyarakat secara umum dan secara khusus Komite Sekolah dalam berkontribusi berupa pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator dalam merealisasikan visi dan misi sekolah.
2. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan, dan dapat dijadikan sebagai referensi serta masukan di bidang kebijakan pendidikan tentang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan mutu sekolah.



## A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian pengelolaan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di SDN 8 Wiringpalennae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran partisipasi masyarakat dalam pendidikan yaitu:
  - a. Adanya partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan secara demokratis di sekolah.
  - b. Partisipasi dalam pelaksanaan pendidikan dapat dilihat dari adanya partisipasi dalam bentuk dana dan daya (tenaga), partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan membimbing belajar anak-anaknya di rumah, baik dari segi akhlak, moral, tata krama dan sopan santun baik dalam berbicara maupun dalam bertingkah laku, menyediakan kebutuhan alat tulis sekolah anaknya, dan tidak ketinggalan orang tua dan masyarakat selalu memotivasi anaknya untuk tetap bersekolah dan memonitoring tugas-tugas di rumah yang diberikan oleh gurunya.
  - c. Manfaat partisipasi masyarakat dalam pendidikan yaitu (a). memperlancar jalannya program sekolah sehingga tujuan sekolah dapat tercapai sesuai harapan (b) adanya rasa memiliki yang berdampak pada loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap program-program sekolah termasuk visi dan misi, dan tujuan sekolah. (c). tidak adanya prasangka buruk dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah, karena stakeholder terlibat langsung, dalam mengusulkan dan memberikan saran untuk kemajuan sekolah.
  - d. Evaluasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan menunjukkan bahwa dengan adanya keterlibatan orang tua dan masyarakat di sekolah maka program sekolah

dapat diselesaikan tepat waktu dan mencapai keberhasilan yang optimal sesuai dengan target pencapaian.

2. Faktor pendukung yang berpengaruh terhadap pengelolaan partisipasi masyarakat (a) Adanya kepemimpinan kepala sekolah SDN 8 Wirimpalennae yang demokratis dan partisipatif. (b). Adanya motivasi dan keinginan orang tua dan masyarakat yang tinggi untuk melihat kemajuan sekolah,
3. Faktor penghambat yang berpengaruh terhadap pengelolaan partisipasi masyarakat yaitu: (a). Terbatasnya waktu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah (b). Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendanaan.